

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Ahmad, Hamzah dan Anando Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, 1996.
- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP “Korupsi, Money Laundering, & Trafficking”*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Alkostar, Artidjo, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- , *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi “Edisi Kedua Cetakan Pertama”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Darwin, Philips, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, 2012.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi) di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008.
- , *Memberantas Korupsi Bersama KPK kajian Yuridis Normatif UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Versi UU No. 30 Tahun 2002*, Cet. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008.
- , *Memberantas Korupsi Bersama KPK “ Kajian Yuridis UURI Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 Juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.

- Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Efendi, Marwan, *Korupsi dan Pencegahan*, Timpani, Jakarta, 2010.
- Ganarsih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, cet. 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Nasional dan Internasional*, cet. Ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahap, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Indrati.S, Maria Farida, *Ilmu perundang-undangan, Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1987.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Penadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum Cet. II*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- McWalters, Ian, SC. *Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*, JPBooks, Surabaya, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moerad, Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005.

- Najih, Mokhammad dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia “ Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia ”*, Setara Press, Malang, 2014.
- PPATK, *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan*, PPATK, Jakarta, 2003.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana “Edisi Revisi”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Rahman, Abdul, *Ilmu Hukum Tata Negara, Teori Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan*, Citara Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Utama Grafitti, Jakarta, 2004.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991.
- Suranta, Ferry Aries, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Jakarta, 2010.
- Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Yustiavanda, Ivan, Arman Nefi, Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Yusuf, Muhammad, Peran PPATK dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Kegiatan Perbankan Permasalahan dan Solusinya, Dialog Interaktif “Kegiatan Perbankan Dalam Perspektif TP Korupsi”, Bandung, 6 Oktober 2011.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
13. UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi) Tahun 2003

## **Jurnal**

Husein, Yunus, "*PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*", Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 22 Nomor 3, 2003).

Manan, Bagir, "*Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*", Varia Peradilan Tahun XXI No. 253, 2006, h. 13.

Oemarmadi, Sarwedi dkk, Jurnal Tool Kit Anti Korupsi, *Lima Belas Langkah Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Indonesia Procurement*, Watch-Hivos, 2005.

## **Internet**

Pengertian Kaidah Hukum Menurut Para Ahli,

<https://www.tesishukum.com/pengertian-kaidah-hukum-menurut-para-ahli/> dibuka pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 20:15 WIB.

Haris, Budi Saiful, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Salam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,

<https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia> di buka pada tanggal 01 April 2017 pukul 12.10 WIB.

Wawan Dijerat Pasal TPPU, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1629-wawan-dijerat-pasal-tppu> dibuka pada tanggal 11 April 2017 pada pukul 17:36 WIB.

<http://nasional.news.viva.co.id>, *Kpk terima penghitungan kerugian kasus simulator*, Diakses tanggal 12 Juli 2018.

<https://gagasanhukum.wordpress.com/2014/01/20/kpk-berwenang-menuntut-tppu/> Diakses pada 10 Juli 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20140830160731-12-2105/wewenang-kpk-tuntut-tppu-harus-ditegaskan-uu>, diakses pada tanggal 06 Mei 2018 Jam 08.45 WIB

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/90029-presiden-minta-mk-tolak-uji-materi-uu-pencucian-uang-yang-dimohonkan-akil-mochtar>, diakses pada tanggal 11 Juni 2018 jam 19.15 WIB

Indonesia Legal Roundtable, <http://www.ilr.or.id/2014/08/penggunaan-pasal-pencucian-uang-naik/> diakses pada tanggal 24 Maret 2015 jam 20.00 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2013/12/31/1208393/Jeratan.TPPU.yang.Mematikan.bagi.Koruptor>, diakses pada tanggal 08 Juli 2018 jam 21.30 WIB

Yunus Husein, dalam artikel KPK Berwenang Menuntut TPPU, <https://gagasanhukum.wordpress.com/2014/01/20/kpk-berwenang-menuntut-tppu/> Diakses pada 10 Juli 2018 Pukul 13:18 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35146/3/Chapter%20II.pdf>, diakses 12 Juli 2018 pukul 22:30 WIB

<http://kbbi.web.id/lapor>, diakses 10 Juli 2018 Pukul 19.21 WIB

### **Lain-lain**

Yunus Husein, dalam artikel KPK Berwenang Menuntut TPPU, 20 Januari 2014.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Pra Penuntutan*, Diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ), Jakarta, 2012.

Henry Black Campbell, *Black's law Dictionary*, 9th edition, West Publishing Co., St. Paul-Minnesota, 2009.